



KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/10/Hukum/2026
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Perwali di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penetapan pengusulan perencanaan pembentukan Perwali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan perencanaan penyusunan Perwali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

HUKUMI Pengkajian

SALINAN

182

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026.
- KESATU : Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa Perwali yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perwali Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk segera menyusun rancangan Perwali berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2026

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 100-3/16/Hukum/2026
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2026

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peraturan Wali Kota	Kerjasama Pemerintah Daerah Pemangku Kepentingan Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri	Pelaksanaan Pembangunan Industri Program	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2026	
						2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2018 tentang RPIP Sulteng 2018-			

2	Peraturan Wali Kota	Pembentukan UPTD <i>Public Safety Centre</i> 119 Nagasi Kota Palu	Struktur organisasi, tugas dan fungsi, ruang lingkup pelayanan serta penyediaan sarana prasarana	✓			2038	7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2024			Dinas Kesehatan	2026
								1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang				

						Pelayanan Kegawatdaruratan				
3	Peraturan Wali Kota	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	Penetapan, kriteria, mekanisme, dan pembiayaan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	2026		
4	Peraturan Wali Kota	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2026		

6	Peraturan Wali Kota	Pemilahan Sampah	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah serta pengaturan komprehensif pemilahan sampah dari sumber hingga pengangkutan, dengan penekanan pada kewajiban setiap pihak dan penerapan sanksi administrative.	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2026	
7.	Peraturan Wali Kota	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	2026	

						4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah				
8.	Peraturan Wali Kota	Produk Daerah	Unggulan	Mengatur tentang jenis produk unggulan daerah kota palu baik berupa barang dan/atau jasa serta permasalahan dan metode pengembangan masing - masing produk unggulan daerah sebagaimana hasil identifikasi dan kajian penetapan produk unggulan daerah kota palu	√	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2026		
9.	Peraturan Wali Kota	Wisata Minat Khusus Di Kawasan Strategis Pariwisata		Wisata minat khusus dalam rencana pembangunan daerah kota palu dari aspek sosial dan budaya dan kawasan strategis pariwisata teluk Palu sebagai produk unggulan daerah Kota Palu yang memiliki beragam wisata minat khusus, model pengembangan wisata minat khusus kawasan strategis pariwisata teluk Palu, sistem kolaborasi kawasan minat	√	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2026		

			khusus kawasan strategis pariwisata teluk palu serta Road Map skema kolaborasi pengembangan wisata minat khusus kawasan strategis wisata Kota Palu							
10.	Peraturan Wali Kota	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kota Palu Tahun 2025-2029	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kota Palu Tahun 2025-2029	√			1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2026	
11.	Peraturan Wali Kota	Inovasi Daerah	Daftar inovasi dilingkup Pemerintah Daerah Kota Palu yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di daerah yang merupakan indikator utama penilaian Index inovasi daerah, berisi daftar Inovasi perangkat daerah	√			1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2026	
12	Peraturan Wali Kota	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara	Perubahan beberapa ketentuan pemungutan pajak daerah		√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4	Bapenda	2026	

		Pemungutan Pajak Daerah					Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
13	Peraturan Wali Kota	Tata Cara Penilaian PBB P2	Pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	√			1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2026	

14	Peraturan Wali Kota	Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Bagian Hukum	2026	
15	Peraturan Wali Kota	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Bagi	Penghapusan ketentuan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan PPH 21 dan iuran BPJS terhadap penerima TPP, dengan penegasan bahwa kewajiban perpajakan dan jaminan sosial dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan pembebanannya ditanggung oleh APBD		√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagian Organisasi	2026	
16	Peraturan Wali Kota	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan,	Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah		√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bagian Organisasi	2026	

		Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah				2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
17	Peraturan Wali Kota	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah	Penyelenggaraan Satu Data	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2026
18.	Peraturan Wali Kota Palu	Kurikulum Muatan Lokal Jenjang SD dan SMP	1. Bahasa dan Sastra Daerah. 2. Kesenian Daerah (musik, tari, teater). 3. Kerajinan dan Keterampilan Daerah. 4. Sejarah Lokal dan Adat Istiadat. 5. Lingkungan Alam/Ekosistem Lokal. 6. Permainan Tradisional	√		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026

19	Peraturan Wali Kota Palu	Penggunaan Pakaian Adat/ Tradisional Bagi Peserta Didik Jenjang SD dan SMP	penetapan model dan warna pakaian adat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai adat istiadat setempat, jadwal penggunaan pada hari atau acara adat tertentu, tujuan pelestarian budaya, serta kewajiban Pemda/sekolah membantu siswa kurang mampu dan larangan mewajibkan pembelian seragam baru, dengan penekanan pada kesetaraan dan kenyamanan siswa	√			Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
			1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2026
20	Peraturan Wali Kota Palu	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Komponen Pembiayaan Kegiatan Reses	√			1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	2026

						3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Kegiatan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
21	Peraturan Wali Kota Palu	Tata Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Pemilihan	1. Fungsi Pengawasan DPRD 2. Belanja Kegiatan 3. Mekanisme pelaksanaan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan 4. Tata Pertanggungjawaban Cara	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	2026		
22	Peraturan Wali Kota	Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2026		

24	Peraturan Wali Kota	Analisis Belanja	Standar	standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan	√				Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2026
									1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		
25	Peraturan Wali Kota	Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		1. penataan sarana dan prasarana kerja 2. standar sarana dan prasarana kerja 3. ketentuan lain-lain	√				1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2026

26	Peraturan Wali Kota	Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada Masyarakat / Investor	1. bentuk pemberian dan/atau investasi 2. tata cara insentif	1. dan kriteria insentif kemudahan 2. cara pemberian dan/atau	√			Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2026	
----	---------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	------	--

			kemudahan modal 3. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi 4. evaluasi dan pelaporan			Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi masyarakat da/atau investor			
27	Peraturan Wali Kota	Penyelenggaraan Pariwisata Sehat	Persyaratan Umum Pariwisata Sehat, Prasarana Penunjang, Pembinaan Dan Pengawasan	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata	2026	
28	Peraturan Wali Kota	Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan	pengendalian dan pengawasan serta pelaporan.		✓	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4	Dinas Lingkungan Hidup	2026	

		Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
29	Peraturan Wali Kota	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir	Parkir Tepi Jalan Umum Perubahan Atas Peraturan Palu Peraturan Wali Kota Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir (terintegrasi secara elektronik) Parkir Khusus elektronik), Parkir Khusus, Parkir Berlangganan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, penyiidikan dan sanksi	✓		1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	2026

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004